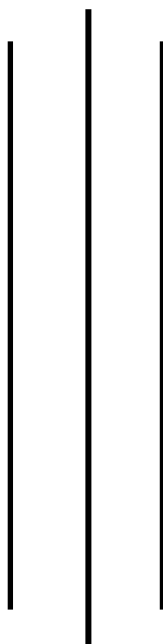




**RENCANA STRATEGIS**  
**BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2016 – 2021**



**BIRO BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2017**

## **Kata Pengantar**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Penyusunan Renstra Tahun 2016 – 2021 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat kami selesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi mengkoordinasikan perencanaan dan Penyusunan Kebijakan ,serta mensinkronkan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan dengan Dinas/Instansi/Badan lainnya dalam mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan.

Atas dasar itulah maka dipandang perlu untuk mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2016 – 2021 agar dapat dijadikan acuan dalam mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan/Pengentasan Kemiskinan kepada semua pihak baik dari komponen yang ada di Lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan maupun unit lainnya yang terlibat dan memberikan masukan didalam Proses Penyusunan Renstra ini,Kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BIRO ADM. KESRA DAN  
KEMASYARAKATAN,



**H. SYAHRUDIN, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601223 198503 1 011

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                                     | <b>i</b>     |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                                                         | <b>I-1</b>   |
| 1.1.      Latar Belakang                                                                                                              | I-1          |
| 1.2.      Landasan Hukum                                                                                                              | I-3          |
| 1.3.      Maksud dan Tujuan                                                                                                           | I-4          |
| 1.4.      Sistematika Penulisan                                                                                                       | I-5          |
| <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI<br/>             SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN<br/>             TENGAH</b> | <b>II-1</b>  |
| 2.1.      Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi                                                                                      | II-1         |
| 2.2.      Sumber Daya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                                | II-5         |
| 2.3.      Kinerja Pelayanan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                               | II-7         |
| 2.4.      Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan                                                                                | II-7         |
| <b>BAB III    ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN<br/>             TUGAS DAN FUNGSI</b>                                                   | <b>III-1</b> |
| 3.1.      Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Biro Organisasi setda Prov. Kalteng                     | III-1        |
| 3.2.      Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih                                          | III-5        |
| 3.3.      Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam<br>Negeri                                                           | III-9        |
| 3.4.      Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis                                                | III-10       |
| 3.5.      Penentuan Isu–Isu Strategis                                                                                                 | III-12       |
| <b>BAB IV    Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan<br/>             Kebijakan</b>                                             | <b>IV-1</b>  |
| 4.1.      Visidan dan Misi                                                                                                            | IV-1         |
| 4.2.      Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah                                                                                          | IV-2         |
| 4.3.      Strategi                                                                                                                    | IV-2         |

|                |                                                                                                   |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.4.           | Kebijakan                                                                                         | IV-2  |
| <b>BAB V</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> |       |
| 5.1            | Rencana Program dan Kegiatan                                                                      | V-1   |
| 5.2            | Indikator Kerja                                                                                   | V-3   |
| <b>BAB VI</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>                          |       |
| 6.1.           | Indikator Kinerja                                                                                 | VI-1  |
| <b>BAB VII</b> | <b>PENUTUP</b>                                                                                    | VII-1 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan RENSTRA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM-D.

Oleh karena itu dalam rangka upaya mendukung Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2016-2021 dan berpedoman pada rancangan awal RPJM-D khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsive dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Renstra Biro Kesra dan Kemasyarakatan tersebut disusun menurut Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Paradigma baru Pembangunan yang mengedepankan Tata Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka untuk menjawab tuntutan pembangunan pemerintahan seutuhnya, dan sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis merupakan sarana yang sekaligus kebutuhan nyata untuk mengatasi baik intern maupun ekstern sebagaimana persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Rencana tersebut diharapkan akan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 - 2021 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan tata kerja lembaga ini.

Didalam Rencana Strategis terkandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan dimasa mendatang. Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak kepada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala (kelemahan dan ancaman/tantangan) yang ada, atau mungkin akan timbul. Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, sangat diperlukan integritas antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dalam arti luas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

- a. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonmor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang;
- j. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder Biro Kesra dan seluruh aparatur di Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Mengetahui kinerja Biro Kesra dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan pada Biro Kesra yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016 – 2021;

- e. Sebagai alat kendali dalam rangka akuntabilitas dan penilaian kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;** berisi Gambaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;** berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra Setjen Kemendagri, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan.

**BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan;** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

**BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif;** berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;** berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

**BAB VII Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

## **Bab 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kesra dan Kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas disamping melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait, juga melaksanakan pembinaan antar Umat beragama, Intern Umat Beragama dan antar Pemerintah dan juga pembinaan kemasyarakatan, kesehatan dan sosial.

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **a. Tugas Pokok**

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Kesra dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Bina Keagamaan, bina sosial, bina kemasyarakatan serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas Bina Keagamaan, bina sosial, bina kemasyarakatan serta kesehatan dan kesejahteraan;
- e. penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

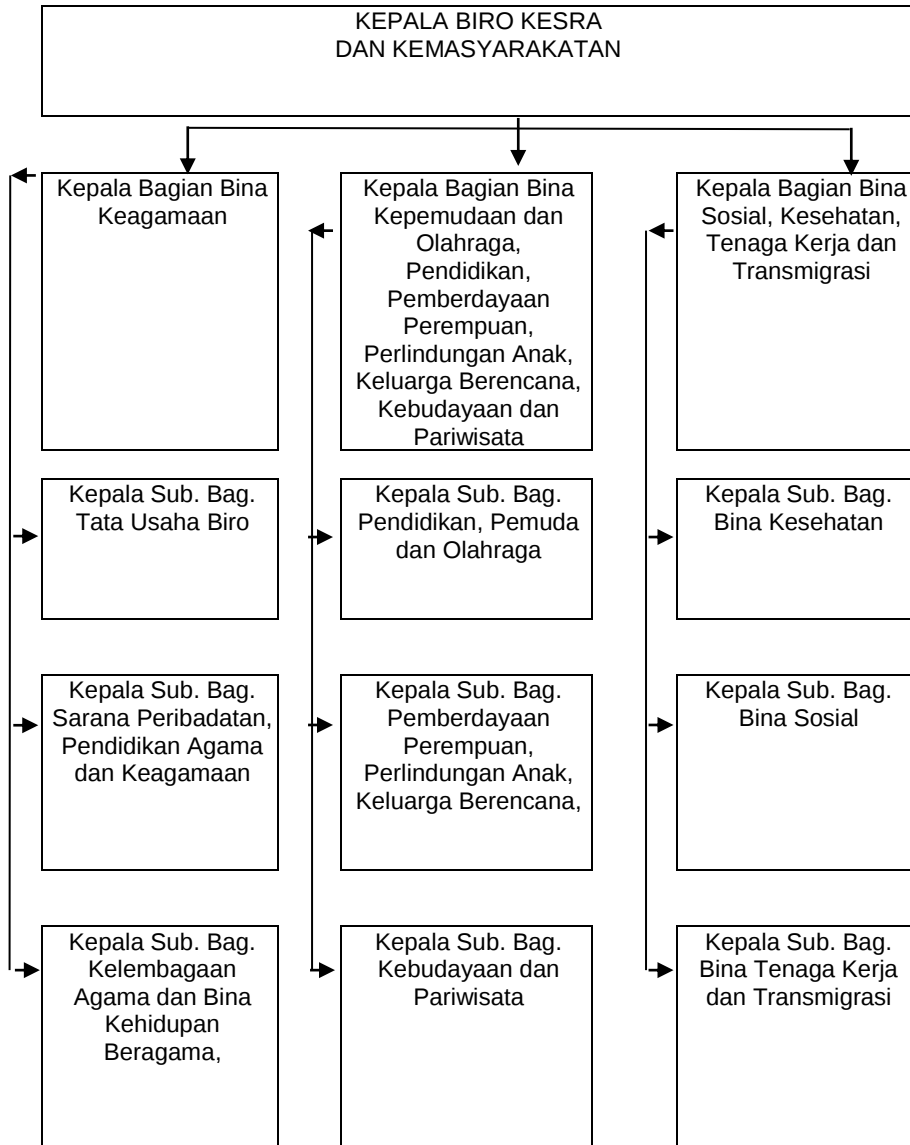
1. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan jabatan eselon II.b
2. Kepala Bagian dengan Jabatan eselon III.a
  - a. Bagian Bina Keagamaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Tata Usaha Biro (eselon IV.a)
    2. Sub Bagian Sub Bagian Sarana Peribadatan, Pendidikan Agama dan Keagamaan (eselon IV.a)
    3. Sub Bagian Sub Bagian Kelembagaan Agama dan Bina Kehidupan Beragama (eselon IV.a)
  - b. Bagian Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (eselon IV.a)
    2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (eselon IV.a)
    3. Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata (IV.a)

c. Bagian Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Bina Kesehatan (IV.a)
2. Sub Bagian Bina Sosial (IV.a)
3. Sub Bagian Bina Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IV.a)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Kesra dan Kemasyarakatan didukung oleh 47 personil yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 3 Kabag, 9 Kasubbag, dan 34 Orang Pelaksana dengan struktur organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam struktur di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA  
BIRO KESRA DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Gambar 2.1**

**2.2. Sumber Daya Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

**1) Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No | Kualifikasi Pendidikan                  | Jumlah |    | Total | Ket |
|----|-----------------------------------------|--------|----|-------|-----|
|    |                                         | L      | P  |       |     |
| 1  | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 0      | 0  | 0     |     |
| 2  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)    | 8      | 6  | 14    | *)  |
| 3  | Diploma Satu (D-1)                      | 0      | 0  | 0     |     |
| 4  | Diploma Tiga (D-3)                      | 1      | 0  | 1     |     |
| 5  | Sarjana (S-1)                           | 14     | 16 | 30    | *)  |
| 6  | Sarjana (S-2)                           | 1      | 1  | 2     |     |
| 7  | Sarjana (S-3)                           | 0      | 0  | 0     |     |
|    | Jumlah                                  | 24     | 23 | 47    |     |

Keterangan: \*) termasuk Pegawai kontrak berjumlah 10 orang terdiri 8 orang Laki-laki dan 2 orang perempuan.

Dari jumlah pegawai sebanyak 47 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

| No | Pangkat dan Golongan     | Jumlah    |           | Total     | Ket |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|    |                          | L         | P         |           |     |
| 1  | I/d Juru Muda            | 0         | 0         | 0         |     |
| 2  | II/a Pengatur Muda       | 8         | 2         | 10        | *)  |
| 3  | II/a Pengatur Muda       | 1         | 0         | 1         |     |
| 4  | II/b Pengatur Muda Tk. I | 3         | 1         | 4         |     |
| 5  | II/c Pengatur            | 2         | 3         | 5         |     |
| 6  | II/d Pengatur Tk. I      | 1         | 0         | 1         |     |
| 7  | III/a Penata Muda        | 3         | 0         | 3         |     |
| 8  | III/a Penata Muda        | 0         | 0         | 0         | *)  |
| 9  | III/b Penata Muda Tk.I   | 3         | 9         | 12        |     |
| 10 | III/c Penata             | 0         | 1         | 1         |     |
| 11 | III/d Penata Tk. I       | 1         | 5         | 6         |     |
| 12 | IV/a Pembina             | 2         | 1         | 3         |     |
| 13 | IV/b Pembina Tk. I       | 1         | 0         | 1         |     |
| 14 | IV/c Pembina Utama Muda  | 0         | 0         | 0         |     |
| 15 | IV/e Pembina Utama       | 0         | 0         | 0         |     |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>25</b> | <b>22</b> | <b>47</b> |     |

Keterangan: \*) Pegawai kontrak/honorar.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3 jabatan eselon II ke bawah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

| No | Struktur dan Fungsional     | Jumlah    |           | Total     |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                             | L         | P         |           |
| 1  | Eselon I                    | 0         | 0         | 0         |
| 2  | Eselon II.b                 | 1         | 0         | 1         |
| 3  | Eselon III.a                | 2         | 1         | 3         |
| 4  | Eselon IV.a                 | 1         | 8         | 9         |
| 5  | Fungsional                  | 0         | 0         | 0         |
| 6  | Non Struktural / Fungsional | 18        | 16        | 34        |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>22</b> | <b>25</b> | <b>47</b> |

### **2.3. Kinerja Pelayanan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Kinerja pelayanan didasarkan pada Program Strategis Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari program kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang disusun guna membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan dibidang Mental Spritual, Sosial, Kemasyarakatan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

Oleh karena itu Program Strategis secara umum, mengutamakan usaha untuk menempatkan kegiatan kebijakan dibidang dibidang Mental Spritual, Sosial, Kemasyarakatan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

#### **Tantangan :**

#### **a. SumberDayaManusia :**

Menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat dan global, diperlukan Sumber Daya Manusia yang siap pakai, terampil dan profesional di bidangnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai/staf melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **b. Saranadanprasarana :**

- 1) Gunamenunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu disediakan kendaraan dinas jabatan untuk Eselon III dan IV sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

#### **Peluang :**

Kesinambungan penyediaan dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang berbagai program kegiatan operasional, dengan diupayakan peningkatan dana dan penajamanprioritas program.

## Bab 3

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis Biro Kesra. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yaitu dengan teknik analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunity, and threat), yaitu merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi kondisi Biro Kesra berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah**

- a. Kurang konsisten dan seringnya berganti dan atau revisi peraturan perundang-undangan mengakibatkan pelaksanaan tugas di daerah sulit mencapai target kinerja dan merupakan hambatan terhadap penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah;

- b. Terbatasnya anggaran, Rendahnya Kompetensi SDMA, dan tidak sinkronnya antar peraturan perundang-undangan merupakan hambatan dalam penyusunan bahan perencanaan strategis organisasi;
- c. Terbatasnya dokumen/data/informasi/laporan sebagai bahan penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan;
- d. Sering berubahnya nomenklatur berdampak pada ketidakkonsistenan program/kegiatan sehingga menyulitkan evaluasi capaian kinerja dan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi;
- e. Terbitnya Undang-undang yang tidak disertai dengan aturan pelaksanaan sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis pembinaan pola karier ASN;
- f. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan tugas pokok fungsinya, lemahnya pengembangan inovasi pelayanan dan kurangnya komitmen dalam mengimplementasikan SPM;
- g. Kurangnya kesadaran aparatur untuk melakukan perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani;
- h. Kurangnya pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan;
- i. Rendahnya kesadaran untuk menekan kepentingan-kepentingan yang bersifat ego sektoral dalam pelaksanaan penataan kelembagaan;
- j. Kurang relevan dan/atau sinkronnya antara regulasi dengan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota;
- k. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur mengidentifikasi karakteristik organisasi dan mengimplementasikan ke dalam tugas pokok dan fungsinya;
- l. Lemahnya pemahaman pemangku jabatan terhadap tanggung jawab jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi menjadi salah satu hambatan analisis jabatan;
- m. Lemahnya mekanisme dan/atau sistem pengawasan internal pemerintah;
- n. Kurang terukurnya indikator capaian kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas dokumen LAKIP;
- o. Potensi kepentingan antara peraturan perundang-undangan dengan kepentingan politik pemerintahan sebagai salah satu masalah terhadap pelaksanaan administrasi dan kebijakan bidang organisasi;

- p. Belum terintegrasinya dokumen mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja dan DPA, sehingga seluruh kegiatan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri;
- q. Lemahnya mekanisme koordinasi antar unit kerja berakibat tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan antar unit kerja / SKPD;

Ditinjau dari lingkungan internal, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- Adanya Political Will dari Gubernur dan DPRD;
- Adanya struktur Organisasi yang jelas;
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
- Kualitas dan kuantitas personil cukup memadai;
- Ketersediaan dana dan fasilitas/Peralatan kantor cukup memadai;
- Eksistensi Biro Kesra yang strategis.

Sebaliknya terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi penghambat atau permasalahan bagi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan sehingga perlu diminimalisir supaya menjadi pendukung terwujudnya kinerja Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- Rendahnya Kompetensi Sumberdaya Manusia;
- Belum efektifnya Koordinasi dan Kemitraan;
- Rendahnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan;
- Terbatasnya Data dan Informasi.

Ditinjau dari lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan guna mewujudkan kinerja Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- Pesatnya Perkembangan IPTEK;
- Adanya Otonomi Daerah;
- Motivasi Kerja yang cukup tinggi.
- Pembinaan Kabupaten/Kota;
- Program/kegiatan didukung oleh pemerintah;
- Peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Sebaliknya terdapat beberapa ancaman yang perlu diminimalisir guna mewujudkan kinerja Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

- Adanya Krisis Multidimensi yang di alami oleh Bangsa Indonesia;
- Kondisi Masyarakat yang semakin kritis;
- Penempatan PNS/pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Pihak luar kurang mengetahui eksistensi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan;
- Lembaga luar sering lebih berkompeten dalam melaksanakan kegiatan internal.

Setelah hasil analisis SWOT dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal (kekuatan/Strengths dan kelemahan/Weaknesses) dan eksternal (peluang/Opportunities dsan Ancaman/Threats), maka berdasarkan hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu :

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan(S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.
2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan Menghindari ancaman (T).

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor SWOT diatas ditetapkan strategi- strategi seperti dibawah ini :

| <div style="text-align: center;">Faktor- faktor<br/>Internal</div> <div style="text-align: center;">Faktor-faktor<br/>Eksternal</div> | (S) Strengths/Kekuatan                                                                                                           | (W)<br>Weaknesses /<br>Kelemahan                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (O) Opportunities/<br>Peluang                                                                                                         | STRATEGI SO :<br>Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada. | STRATEGI WO :<br>Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada. |
| (T) Threats/Ancaman                                                                                                                   | STRATEGI ST :<br>Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)                      | STRATEGI WT :<br>Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).            |

### **3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan dokumen RPJMD, **Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021**, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS) "**

#### **Misi :**

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Percepatan Pembangunan infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Peningkatan aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi
7. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **Program :**

- Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Percepatan Pembangunan infrastruktur
  - a. Jalan, Jembatan;
  - b. Jalan Kereta Api;
  - c. Pelabuhan Udara;
  - d. Pelabuhan Laut, ASDP (Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan)
  - e. Kelistrikan.
- Pengelolaan Sumber Daya Air Pesisir dan Pantai
- Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan:
  - a. Pengendalian Inflasi;
  - b. Pertumbuhan Ekonomi;
  - c. Penanggulangan Kemiskinan.

- Peningkatan aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH, perlu langkah-langkah strategi sebagai berikut :
  - a. Membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berkarya di instansi Pemerinlah maupun Swasta ;
  - b. Mengupayakan agar setiap Rumah Tangga memiliki sumber usaha yang menghasilkan pendapatan tetap secara terus menerus guna membiayai kebutuhan hidup secara layak ;
  - c. MerasionaIkan harga kebutuhan bahan pokok (pangan, sandang dan Perumahan) ;
  - d. Gerakan Fasititor desa yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif pada lokal – lokal atau komunitas- komunitas tertentu ;
  - e. Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan ;
  - f. Mendukung dan mempercepat ijin usaha ekonomi menengah kebawah ;
- Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi :
  - a. Mempersiapkan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan yang profesional & anti korupsi ;
  - b. Penempatan Personalia Aparatur Pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kompetensinya ;
  - c. Mendukung pemekaran wilayah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :
  - 1. Pendidikan :
    - a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan;
    - b. Mengotimalkan manajemen pendidikan dengan akhir kelulusan yang memiliki daya saing tinggi;
    - c. Peningkatan Kualitas Dosen/Guru pada semua jenjang di bidang pendidikan;
    - d. Pengiriman Mahasiswa berprestasi sekolah keluar negeri;
    - e. Revitalisasi kegiatan olah raga, seni budaya dan pembinaan general muda.

2. Kesehatan :

- a. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualifikasi rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat & pemberantasan narkoba;
- c. Peningkatan kualifikasi Dokter dan Paramedis.

3. Sosial Budaya :

- a. Harmonisasi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Memantapkan keberadaan masyarakat adat dayak dan kearifan lokal dalam filosofi budaya betang;
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta tujuan wisata di Kalteng;
- d. Pengembangan objek-objek pariwisata baik objek wisata budaya maupun wisata alam di Kalteng;
- e. Membuka pendidikan kepariwisataan untuk penyediaan tenaga pelayanan pariwisata di Kalteng.

- Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) :

- a. Pelaksanaan legislasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi lahan bagi kelompok tani;
- b. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
- c. Pengelolaan SDA secara berhati-hati serta berkelanjutan;
- d. Reboisasi dan Rehabilitasi lahan dan hutan;
- e. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
- f. Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta Ha.

- Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- a. Mendorong dan mengupayakan kerja-sama dengan Pihak Perguruan Tinggi dan Swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya;.
- c. Peningkatan kompetensi SDM pengelola;

**Permasalahan :**

**1. Kurangnya penyediaan infrastruktur pembangunan :**

- Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan;
- Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kabupaten/kota
- Luas wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit

**2. Rendahnya pengembangan ekonomi lokal :**

- Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional
- Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan
- Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
- Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.
- Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
- Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi
- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
- Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM
- Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar

- Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain.

### **3. Rendahnya kualitas dan keterjangkauan pendidikan**

- Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima;
- Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir;
- Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

### **4. Lemahnya penanganan bidang kesejahteraan sosial**

- Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi;
- Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan;
- Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular;
- Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

### **5. Rendahnya pengembangan kapasitas birokrasi**

- Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah ("kanwil-kanwil") menyebabkan proses koordinasi masih lemah;
- Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;

- Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur;
- Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan;
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum;
- Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan;
- Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku

## **6. Kurangnya pengelolaan sumber daya alam**

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah relatif rendah.

### **3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kementerian, sebagaimana visinya yang diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci dalam rangka mewujudkan Setjen Kemendagri sebagai organisasi yang mampu memberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri adalah :

*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governace)*, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik antara lain : Akuntabilitas, Pengawasan, Daya tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan efektifitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke depan, Partisipasi, dan Penegakan Hukum.

*Pelayanan Prima*, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan bahwa "*Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*".

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri*, merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut azas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Mencermati ketiga kata kunci di atas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung tugas dan fungsi Kemendagri dimaksud, seluruh unit kerja dilingkungan Setjen harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis tersebut, visi Setjen ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud.

Mengacu pada Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian dalam Negeri untuk lima tahun kedepan, yaitu :

1. Memanfaatkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur.
2. Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien dan prorsioan, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN;

3. Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kemendagri dan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan akses informasi berbasis *e-government*.
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kemendagri secara berkualitas dan memadai

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil,

makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Pengembangan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sangat terkait dengan RTRW Setda Provinsi Kalimantan Tengah dimana Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan diharapkan memiliki fungsi utama sebagai penunjang bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan system informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina mental spiritual, bina social dan bina kemasyarakatan serta bina kesehatan dan kesejahteraan

### **3.5 Isu-isu Strategis :**

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan.

Isu-isu Strategis pada RPJMD 2010-2015 merupakan bagian tahapan pembangunan kedua RPJPD Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Masih rendahnya jumlah kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi yang memadai.

# Bab 4

## VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### 4.1. Visi dan Misi

Untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja, jajaran Biro Kesra dan Kemasyarakatan menetapkan Visi dan Misi yang dirumuskan sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan guna mencapai pembangunan Kalimantan Tengah Kalteng Berkah ”

Misi :

1. Meningkatkan Pemahaman kerukunan umat beragama dan Bina Mental Spiritua dan Pelayanan Sarana Peribadatan dan Pendidikan, Kelembagaan Kehidupan Umat Beragama.
2. Meningkatkan pelayanan dan Koordinasi Bina Kepemudaan & Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kb, Budaya & Pariwisata.
3. Meningkatkan Pelayanan dan Koordinasi Bina Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja & Transmigrasi.
4. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesra dan Kemasyarakatan**

### **Tujuan**

- a. Meningkatkan koordinasi pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

### **Sasaran**

- a. Tercapainya koordinasi yang efektif dan efisiensi dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan.
- b. Tercapainya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggara dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesra

## **4.3 Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif)**

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Kesra, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan botom-up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang Bina Mental dan Spritual, Sosial, Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan.

## **4.4 Kebijakan**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk Tahun 2017 antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi Bina Mental dan Spritual yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan pembinaan Pelayanan Sosial dalam pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
- c. Meningkatkan pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan.

## Bab 5

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program pembangunan RPJMD Kalteng 2016-2021.

#### **Program Biro Kesra dan Kemasyarakatan :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pembinaan Kesehatan
5. Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan
6. Program Pembinaan Kesra dan Kemasyarakatan

**Kegiatan Biro Kesra dan Kemasyarakatan :**

1. Penyediaan Jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan jasa komunikasi internet
8. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
9. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
10. Penyusunan RKA-RKPD
11. Penyusunan LAKIP.
12. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra
13. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan
14. Pelatihan Pelayanan Kesehatan PMI
15. Pengadaan Barang/Jasa Klinik NU Palangka Raya
16. Pembinaan Pondok dan Pesantren Madrasah
17. Peningkatan Pelayanan Emabarkasi Haji Antara
18. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
19. Pengadaan Peralatan Habsyi (Tarbang)
20. Pembinaan mental kepribadian anak
21. Pembinaan pemuda/remaja antar agama
22. KKR anak sekolah minggu
23. Pengadaan Buku Kitab Suci
24. Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Kesra
25. Peningkatan Peranan Perempuan pada Lembaga Pemerintah

**5.2. Indikator Kerja**

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagaimana dalam **Tabel 5.1** berikut :



## Bab 6

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang bidang Bina Mental dan Spritual, Sosial, Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut :

**Tabel 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ADM. KESRA DAN**  
**KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

| Sektor                                               | Sasaran<br>RPJMD/Renstra                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bidang Sektor<br>Bina Mental<br>Spritual             | Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Kehidupan Beragama                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan</li><li>- Jumlah Pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama</li></ul>                                                             |
| Bidang Sektor<br>Bina Sosial                         | Meningkatnya<br>pelayanan sosial,<br>pembinaan<br>pendidikan dan<br>kegiatan pemuda.                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kemiskinan dan Anak Terlantar.</li><li>- Persentase Fasilitasi bantuan pendidikan</li><li>- Persentase Koordinasi Kegiatan Organisasi Pemuda</li></ul> |
| Bidang Sektor<br>Bina<br>Kemasyarakatan              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan Pendampingan dan koordinasi pembinaan Peran Masyarakat dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li><li>- Meningkatkan Inventarisasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKT Tanah Adat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase Pendampingan dan koordinasi pembinaan Peran Masyarakat dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</li><li>- Jumlah Pembuatan SKT Tanah Adat</li></ul>                                                 |
| Bidang Sektor<br>Bina kesehatan<br>dan Kesejahteraan | Meningkatnya<br>Koordinasi dan<br>Fasilitasi kesehatan,<br>kesadaran tentang<br>keluarga sejahtera,<br>kualitas<br>kesejahteraan<br>perempuan dan Anak                                                                                         | Persentase orang/masyarakat yang mengerti tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Fungsi KB dan Kesetaraan Gender.                                                                                                               |

# Bab 7

## PENUTUP

Rencana Strategis Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi kalimantan Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 – 2021 tentunya akan diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

KEPALA BIRO ADM. KESRA  
DAN KEMASYARAKATAN,

**H. SYAHRUDIN, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601223 198503 1 011

**Tabel 4.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Jangka Menengah Pelayanan Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah**

| No. | TUJUAN                                             | SASARAN                                              | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET KINERJA PADA TAHUN |            |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                    |                                                      |                                                  | 2016                      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                  | (4)                                              | (5)                       | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       |
| 1   | Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat  | SKPD Terkait                                         | Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas             | 1500 Surat                | 1500 Surat | 2000 Surat | 2000 Surat | 3000 Surat | 3000 Surat |
| 2   | Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan           | Lomba Sekolah Sehat Kabupaten/Kota                   | Jumlah jasa administrasi keuangan                | 7 Macam                   | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    |
| 3   | Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja        | Perbaikan Komputer, Printer dan alat kantor lainnya. | Jumlah peralatan yang diperbaiki                 | 10 Unit                   | 20 Unit    | 20 Unit    | 20 Unit    | 30 Unit    | 30 Unit    |
| 4   | Tersedianya alat tulis kantor Biro                 | Penyediaan ATK Kantor.                               | Jumlah alat tulis kantor                         | 16 Macam                  | 16 Macam   | 20 Macam   | 20 Macam   | 30 Macam   | 40 Macam   |
| 5   | Tersedianya keperluan pengadaan                    | Pengadaan barang cetakan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan            | 500 Buah                  | 500 Buah   | 500 Buah   | 800 Buah   | 800 Buah   | 800 Buah   |
| 6   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor      | Pengadaan Komputer, Printer dan alat kantor lainnya. | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor         | 10 Unit                   | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    |
| 7   | koordinasi dan konsultasi                          | Pemerintah Pusat.                                    | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | 15 OT                     | 15 OT      | 15 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      |
| 8   | koordinasi dan konsultasi                          | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 15 OT                     | 15 OT      | 15 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      |
| 9   | Tersedianya Jasa Internet                          | Jasa Internet.                                       | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi internet       | 12 Bulan                  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   |
| 10  | Tersedianya hasil Monitoring dan evaluasi program  | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah Monitoring dan evaluasi program           | 20 OT                     | 20 OT      | 20 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      |
| 11  | terikutnya orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait   | 25 OT                     | 25 OT      | 25 OT      | 30 OT      | 30 OT      | 30 OT      |
| 12  | Jumlah laporan keuangan                            | Pembuatan laporan keuangan                           | Jumlah laporan keuangan                          | 20 Dok                    | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     |
| 13  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun           | Pembuatan laporan keuangan akhir tahun               | Jumlah laporan keuangan akhir tahun              | 15 Dok                    | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     |
| 14  | Tercapainya Penyusunan RKA-SKPD                    | Pembuatan RKA-SKPD                                   | Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)   | 65 Buku                   | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    |

|    |                                                                 |                                                                                       |                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | Tercapainya Penyusunan LAKIP                                    | Penyusunan LAKIP Biro                                                                 | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                   | 12 Buku   | 12 Buku   | 12 Buku   | 15 Buku   | 15 Buku   | 15 Buku   |
| 16 | Terbinanya kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera      | Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera di Kab/Kota | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera                           | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 17 | Terlaksananya pembinaan tentang Keluarga Harapan                | koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan di Kab/Kota                        | Jumlah koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan                                                  | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 18 | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Pengembangan KB | koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB di Kab/Kota                         | Jumlah koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB                                                   | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 19 | Laporan hasil Pemantauan dan pembangunan pemuda                 | pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota                                                   | Jumlah pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota                                                                 | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 20 | Laporan hasil organisasi pemuda                                 | Organisasi Pemuda                                                                     | Jumlah Koordinasi Kegiatan Organisasi Pemuda                                                               | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 21 | Pembinaan Drum Band Isen Mulang Sekretariat Daerah              | Pelajar dan Mahasiswa                                                                 | Jumlah yang mengikuti Pembinaan Drum Band Isen Mulang                                                      | 60 Orang  | 60 Orang  | 60 Orang  | 60 Orang  | 60 Orang  | 60 Orang  |
| 22 | Laporan sinkronisasi penanganan kemiskinan dan anak terlantar   | anak-anak terlantar                                                                   | Jumlah Koordinasi masalah kemiskinan dan anak terlantar                                                    | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 25 OT     | 25 OT     | 25 OT     |
| 23 | Terkoordinasinya kualitas kesejahteraan perempuan di Kalteng    | Kaum Perempuan Kalteng                                                                | Jumlah koordinasi kualitas kesejahteraan perempuan                                                         | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 24 | Terwujudnya kegiatan Monev dan Evaluasi TPPO dan Esa            | Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana di Kab/Kota                 | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana. | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     | 15 OT     |
| 25 | Terwujudnya Peranan Perempuan pada Lembaga Pemerintah           | Organisasi dan Lembaga Perempuan                                                      | Jumlah yang mengikuti kegiatan Peran dan fungsi perempuan dilembaga pemerintah                             | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang |
| 26 | Terbinanya lembaga adat dan lembaga sosial budaya               | Damang Kepala Adat di Kab/Kota                                                        | Jumlah Pembinaan damang kepala adat dan Pengadaan buku tentang hukum adat daerah.                          | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27 | Terlaksanya fasilitasi dan koordinasi pembinaan peran masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan                              | organisasi kemasyarakatan didaerah                                                                | Jumlah Pendampingan Pemprov dengan organisasi kemasyarakatan didaerah.                                                          | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      |
| 28 | Terlaksanya kerja sama dengan Dinas instansi terkait                                                                              | Tenaga Kerja di Kalteng                                                                           | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi             | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      |
| 29 | Terdatanya tanah-tanah adat dan haka-hak adat                                                                                     | Tanah Adat di Kab/Kota                                                                            | Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   |
| 30 | Terbinanya lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                                                 | Damang Kepala Adat dari Kab/Kota                                                                  | Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                   | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang |
| 31 | Pendampingan Tim pembina UKS dan SET TP.UKS                                                                                       | pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                                     | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                   | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      |
| 32 | Laporan Hasil pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal                                          | Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal di Kab/Kota | Jumlah Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal                                    | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      |
| 33 | Tercapainya Koordinasi Bidang Kesehatan meliputi Penanggulangan HIV AIDS, Eliminasi Malaria dan Pengendalian Zoonosis di Kab/Kota | SKPD Terkait 14 Kab/Kota                                                                          | Jumlah koordinasi bidang kesehatan meliputi penanggulangan HIV AIDS, Eliminasi Malaria dan Pengendalian Zoonosis di Kab/Kota    | 35 OT      | 35 OT      | 35 OT      | 35 OT      | 35 OT      | 35 OT      |
| 34 | Terpadunya kegiatan pelayanan pembinaan keagamaan di Kalteng                                                                      | SKPD Terkait 14 Kab/Kota                                                                          | Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi Antar Umat Beragama                                                                      | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  |
| 35 | Meningkatnya pembinaan pemahaman Remaja akan agama                                                                                | Pemuda dan Remaja                                                                                 | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Minggu                                                 | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  |

|    |                                                     |                                                                                      |                                                                                             |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36 | Tersedianya Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren | Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                    | Jumlah Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                    | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  |
| 37 | Pelayanan Prima untuk Jamaah Haji                   | Calon Jamaah Haji di 14 Kab/Kota di Kalteng                                          | Jumlah Calon Jamaah Haji                                                                    | 95%       | 95%       | 98%       | 98%       | 100%      | 100%      |
| 38 | Meningkatnya keimanan generasi muda terhadap TYME   | Pelajar dan Mahasiswa                                                                | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental Kepribadian Anak                            | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang |
| 39 | Meningkatnya pemahaman pemuda/remaja antar agama    | Pemuda dan Remaja                                                                    | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pemuda/Remaja antar Agama                          | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang |
| 40 | Meningkatnya pemahaman KKR anak sekolah minggu      | anak-anak Sekolah Minggu                                                             | Jumlah yang mengikuti kegiatan KKR anak sekolah minggu                                      | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang |
| 41 | Meningkatnya pemahaman terhadap agama               | Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) | Jumlah Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  |

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatip  
Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan  
Provinsi Kalimantan Tengah

| Tujuan                                             | Sasaran                                              | Indikator Sasaran                                                                       | Kode       | Program dan Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)                               | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |                                                 |         | Unit Kerja Biro Penganggung jawab |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|                                                    |                                                      |                                                                                         |            |                                                       |                                                                                         |                                          | Tahun 2016                                    |             | Tahun 2017   |             | Tahun 2018   |             | Tahun 2019   |             | Tahun 2020   |             | Tahun 2021   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Biro |         |                                   |
|                                                    |                                                      |                                                                                         |            |                                                       |                                                                                         |                                          | Target (8)                                    | Rp (9)      | Target (10)  | Rp (11)     | Target (12)  | Rp (13)     | Target (14)  | Rp (15)     | Target (16)  | Rp (17)     | Target (18)  | Rp (19)     | Target (20)                                     | Rp (21) |                                   |
| (1)                                                | (2)                                                  | (3)                                                                                     | (4)        | (6)                                                   | (7)                                                                                     |                                          |                                               |             |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |                                                 |         | (22)                              |
| Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat  | SKPD Terkait                                         | Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas                                                    | 1.20.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                        | Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas                                                    | 1500 Surat                               | 1500 Surat                                    | 15,000,000  | 1500 Surat   | 15,000,000  | 1500 Surat   | 15,000,000  | 1500 Surat   | 15,000,000  | 1500 Surat   | 15,000,000  | 1500 Surat   | 15,000,000  | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan           | Lomba Sekolah Sehat Kabupaten/Kota                   | Jumlah jasa administrasi keuangan                                                       | 1.20.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                 | Jumlah jasa administrasi keuangan                                                       | 7 Macam                                  | 7 Macam                                       | 390,000,000 | 10 Macam     | 390,000,000 | 10 Macam     | 390,000,000 | 10 Macam     | 390,000,000 | 10 Macam     | 390,000,000 | 10 Macam     | 390,000,000 | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja        | Perbaikan Komputer, Printer dan alat kantor lainnya. | Jumlah peralatan yang diperbaiki                                                        | 1.20.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja             | Jumlah peralatan yang diperbaiki                                                        | 10 Unit                                  | 10 Unit                                       | 60,000,000  | 10 Unit      | 60,000,000  | 10 Unit      | 60,000,000  | 10 Unit      | 60,000,000  | 10 Unit      | 60,000,000  | 10 Unit      | 60,000,000  | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya alat tulis kantor Biro                 | Penyediaan ATK Kantor.                               | Jumlah alat tulis kantor                                                                | 1.20.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                          | Jumlah alat tulis kantor                                                                | 16 Macam                                 | 16 Macam                                      | 75,000,000  | 16 Macam     | 75,000,000  | 16 Macam     | 75,000,000  | 16 Macam     | 75,000,000  | 16 Macam     | 75,000,000  | 16 Macam     | 75,000,000  | 100%                                            |         | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya keperluan pengadaan                    | Pengadaan barang cetakan                             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                                   | 1.20.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan             | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                                   | 500 Buah                                 | 500 Buah                                      | 15,000,000  | 30000 lembar | 15,000,000  | 30000 lembar | 15,000,000  | 30000 lembar | 15,000,000  | 30000 lembar | 15,000,000  | 30000 lembar | 15,000,000  | 100%                                            |         | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor      | Pengadaan Komputer, Printer dan alat kantor lainnya. | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                                | 1.20.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                                | 10 Unit                                  | 10 Unit                                       | 318,559,340 | 10 Unit      | 318,559,340 | 10 Unit      | 318,559,340 | 10 Unit      | 318,559,340 | 10 Unit      | 318,559,340 | 10 Unit      | 318,559,340 | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| koordinasi dan konsultasi                          | Pemerintah Pusat.                                    | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                         | 1.20.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                         | 15 OT                                    | 15 OT                                         | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| koordinasi dan konsultasi                          | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                        | 1.20.01.19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                        | 15 OT                                    | 15 OT                                         | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 15 OT        | 100,000,000 | 100%                                            |         | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya Jasa Internet                          | Jasa Internet.                                       | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi internet                                              | 1.20.01.28 | Penyediaan jasa komunikasi internet                   | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi internet                                              | 12 Bulan                                 | 12 Bulan                                      | 36,000,000  | 12 Bulan     | 36,000,000  | 12 Bulan     | 36,000,000  | 12 Bulan     | 36,000,000  | 12 Bulan     | 36,000,000  | 12 Bulan     | 36,000,000  | 100%                                            |         | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya hasil Monitoring dan evaluasi program  | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan                          | 1.20.05.18 | Monitoring dan evaluasi program                       | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan evaluasi program         | 20 OT                                    | 20 OT                                         | 175,000,000 | 20 OT        | 175,000,000 | 20 OT        | 175,000,000 | 20 OT        | 175,000,000 | 20 OT        | 175,000,000 | 20 OT        | 175,000,000 | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| terikutnya orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait | Pemerintah Kab/Kota.                                 | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait | 1.20.05.19 | Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait     | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait | 25 OT                                    | 25 OT                                         | 170,000,000 | 25 OT        | 170,000,000 | 25 OT        | 170,000,000 | 25 OT        | 170,000,000 | 25 OT        | 170,000,000 | 25 OT        | 170,000,000 | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Jumlah laporan keuangan                            | Pembuatan laporan keuangan                           | Jumlah laporan keuangan                                                                 | 1.20.06.02 | Penyusunan laporan keuangan semesteran                | Jumlah laporan keuangan                                                                 | 20 Dok                                   | 20 Dok                                        | 7,000,000   | 20 Dok       | 7,000,000   | 20 Dok       | 7,000,000   | 20 Dok       | 7,000,000   | 20 Dok       | 7,000,000   | 20 Dok       | 7,000,000   | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |
| Tersedianya laporan keuangan akhir tahun           | Pembuatan laporan keuangan akhir tahun               | Jumlah laporan keuangan akhir tahun                                                     | 1.20.06.04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun             | Jumlah laporan keuangan akhir tahun                                                     | 15 Dok                                   | 15 Dok                                        | 7,000,000   | 15 Dok       | 7,000,000   | 15 Dok       | 7,000,000   | 15 Dok       | 7,000,000   | 15 Dok       | 7,000,000   | 15 Dok       | 7,000,000   | 100%                                            | -       | Biro Adm Kesra dan Kemasya.       |

|                                                                 |                                                                                       |                                                                                  |            |                                                                                                                    |                                                                                  |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |      |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|---|-----------------------------|
| Tercapainya Penyusunan RKA-SKPD                                 | Pembuatan RKA-SKPD                                                                    | Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)                                   | 1.20.06.06 | Penyusunan RKA-SKPD                                                                                                | Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)                                   | 65 Buku   | 65 Buku   | 7,000,000   | 70 Dok    | 7,000,000   | 70 Dok    | 7,000,000   | 70 Dok    | 7,000,000   | 70 Dok    | 7,000,000   | 70 Dok    | 7,000,000   | 100% | - | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Tercapainya Penyusunan LAKIP                                    | Penyusunan LAKIP Biro                                                                 | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                 | 1.20.06.14 | Penyusunan LAKIP                                                                                                   | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                 | 12 Buku   | 12 Buku   | 7,000,000   | 12 Dok    | 7,000,000   | 12 Dok    | 7,000,000   | 12 Dok    | 7,000,000   | 12 Dok    | 7,000,000   | 12 Dok    | 7,000,000   | 100% | - | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terbinanya kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera      | Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera di Kab/Kota | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera | 1.12.15.11 | Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera                                          | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% | - | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terlaksananya pembinaan tentang Keluarga Harapan                | koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan di Kab/Kota                        | Jumlah koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan                        | 1.12.15.14 | Koordinasi dan Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)                                                           | Jumlah koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan                        | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% | - | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Pengembangan KB | koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB di Kab/Kota                         | Jumlah koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB                         | 1.12.15.20 | Koordinasi dan Konsultasi Program Pengembangan KB                                                                  | Jumlah koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB                         | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% | - | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Laporan hasil Pemantauan dan pembangunan pemuda                 | pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota                                                   | Jumlah pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota                                       | 1.18.15.02 | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda                                                             | Jumlah pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota                                       | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Laporan hasil organisasi pemuda                                 | Organisasi Pemuda                                                                     | Jumlah Koordinasi Kegiatan Organisasi Pemuda                                     | 1.18.15.12 | Koordinasi Kegiatan Organisasi Pemuda                                                                              | Jumlah Koordinasi Kegiatan Organisasi Pemuda                                     | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Pembinaan Drum Band Isen Mulang Sekretariat Daerah              | Pelajar dan Mahasiswa                                                                 | Jumlah anggota Drum Band Isen Mulang Sekretaris Daerah Prov. Kalteng             | 1.18.15.14 | Pembinaan Drum Band Isen Mulang Sekretaris Daerah Prov. Kalteng                                                    | Jumlah anggota Drum Band Isen Mulang Sekretaris Daerah Prov. Kalteng             | 60 Orang  | 60 Orang  | 150,000,000 | 50 Orang  | 150,000,000 | 50 Orang  | 150,000,000 | 50 Orang  | 150,000,000 | 50 Orang  | 150,000,000 | 50 Orang  | 150,000,000 | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Laporan sinkronisasi penanganan kemiskinan dan anak terlantar   | anak-anak terlantar                                                                   | Jumlah Koordinasi masalah kemiskinan dan anak terlantar                          | 1.13.16.19 | Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kemiskinan dan anak terlantar                                               | Jumlah Koordinasi masalah kemiskinan dan anak terlantar                          | 20 OT     | 20 OT     | 90,000,000  | 15 OT     | 90,000,000  | 15 OT     | 90,000,000  | 15 OT     | 90,000,000  | 15 OT     | 90,000,000  | 15 OT     | 90,000,000  | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terkoordinasinya kualitas kesejahteraan perempuan di Kalteng    | Kaum Perempuan Kalteng                                                                | Jumlah koordinasi kualitas kesejahteraan perempuan                               | 1.11.22.01 | Koordinasipeningkatan kualitas kesejahteraan perempuan                                                             | Jumlah koordinasi kualitas kesejahteraan perempuan                               | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terwujudnya kegiatan Movev dan Evaluasi TPPO dan Esa            | Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana di Kab/Kota                 | Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana.                | 1.11.22.02 | Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Eksploritasi Sex Anak (ESA) | Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana.                | 15 OT     | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 15 OT     | 70,000,000  | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terwujudnya Peranan Perempuan pada Lembaga Pemerintah           | Organisasi dan Lembaga Perempuan                                                      | Jumlah yang mengikuti kegiatanPeran dan fungsi perempuan dilembaga pemerintah    | 1.11.22.01 | Peningkatan Peranan Perempuan pada Lembaga Pemerintah                                                              | Jumlah yang mengikuti kegiatanPeran dan fungsi perempuan dilembaga pemerintah    | 250 Orang | 250 Orang | 170,000,000 | 250 Orang | 170,000,000 | 250 Orang | 170,000,000 | 250 Orang | 170,000,000 | 250 Orang | 170,000,000 | 250 Orang | 170,000,000 | 100% |   | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |

|                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                       |            |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |            |            |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |      |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|--|-----------------------------|
| Terbinanya lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                    | Damang Kepala Adat di Kab/Kota                                                                    | Jumlah Pembinaan damang kepala adat dan Pengadaan buku tentang hukum adat daerah.                                                     | 1.13.22.01 | Koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                       | Jumlah Pembinaan damang kepala adat dan Pengadaan buku tentang hukum adat daerah.                                                     | 20 OT      | 20 OT      | 15,000,000  | 20 OT     | 15,000,000  | 20 OT     | 15,000,000  | 20 OT     | 15,000,000  | 20 OT     | 15,000,000  | 20 OT     | 15,000,000  | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terlaksanya fasilitasi dan koordinasi pembinaan peran masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan | organisasi kemasyarakatan didaerah                                                                | Jumlah Pendampingan Pemprov dengan organisasi kemasyarakatan didaerah.                                                                | 1.13.22.02 | Pendampingan dan koordinasi pembinaan peran masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan                        | Jumlah Pendampingan Pemprov dengan organisasi kemasyarakatan didaerah.                                                                | 25 OT      | 25 OT      | 170,000,000 | 25 OT     | 170,000,000 | 25 OT     | 170,000,000 | 25 OT     | 170,000,000 | 25 OT     | 170,000,000 | 25 OT     | 170,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terlaksanya kerja sama dengan Dinas instansi terkait                                                 | Tenaga Kerja di Kalteng                                                                           | Jumlah Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi                                                            | 1.13.22.03 | Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi                                               | Jumlah Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi                                                            | 14 OT      | 14 OT      | 150,000,000 | 14 OT     | 150,000,000 | 14 OT     | 150,000,000 | 14 OT     | 150,000,000 | 14 OT     | 150,000,000 | 14 OT     | 150,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terdatanya tanah-tanah adat dan hak-hak adat                                                         | Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKT Tanah Adat pada Desa Percontohan di Kab/Kota | Jumlah Tim IP4T Prov. Kalteng                                                                                                         | 1.13.22.04 | Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Prov. Kalteng | Jumlah Tim IP4T Prov. Kalteng                                                                                                         | 40 Orang   | 40 Orang   | 350,000,000 | 40 Orang  | 350,000,000 | 40 Orang  | 350,000,000 | 40 Orang  | 350,000,000 | 40 Orang  | 350,000,000 | 40 Orang  | 350,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terbinanya lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                    | Damang Kepala Adat dari Kab/Kota                                                                  | Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                         | 1.13.22.05 | Rapat koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                 | Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                         | 100 Damang | 100 Damang | 350,000,000 | 100 Orang | 350,000,000 | 100 Orang | 350,000,000 | 100 Orang | 350,000,000 | 100 Orang | 350,000,000 | 100 Orang | 350,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Pendampingan Tim pembina UKS dan SET TP.UKS                                                          | pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                                     | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                         | 1.01.26.02 | Pendampingan pembina UKS dan SET TP.UKS                                                                           | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                         | 20 OT      | 20 OT      | 110,000,000 | 20 OT     | 110,000,000 | 20 OT     | 110,000,000 | 20 OT     | 110,000,000 | 20 OT     | 110,000,000 | 20 OT     | 110,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Laporan Hasil pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal             | Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal di Kab/Kota | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal | 1.01.26.04 | Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal di Kab/Kota                 | Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal | 20 OT      | 20 OT      | 125,000,000 | 20 OT     | 125,000,000 | 20 OT     | 125,000,000 | 20 OT     | 125,000,000 | 20 OT     | 125,000,000 | 20 OT     | 125,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Dokumen hasil rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit                                | penanggulangan HIV/AIDS                                                                           | Jumlah Koordinasi Bidang Kesehatan                                                                                                    | 1.02.53.01 | Koordinasi Bidang Kesehatan                                                                                       | Jumlah Koordinasi Bidang Kesehatan                                                                                                    | 35 OT      | 35 OT      | 215,000,000 | 35 OT     | 215,000,000 | 35 OT     | 215,000,000 | 35 OT     | 215,000,000 | 35 OT     | 215,000,000 | 35 OT     | 215,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Terpadunya kegiatan pelayanan pembinaan keagamaan di Kalteng                                         | SKPD Terkait 14 Kab/Kota                                                                          | Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi Antar Umat Beragama                                                                            | 1.20.53.01 | Rapat koordinasi antar umat beragama                                                                              | Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi Antar Umat Beragama                                                                            | 250 Orang  | 250 Orang  | 300,000,000 | 250 Orang | 300,000,000 | 250 Orang | 300,000,000 | 250 Orang | 300,000,000 | 250 Orang | 300,000,000 | 250 Orang | 300,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Meningkatnya pembinaan pemahaman Remaja akan agama                                                   | Pemuda dan Remaja                                                                                 | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Minggu                                                       | 1.20.53.02 | Pembinaan pesantren madrasah dan sekolah minggu                                                                   | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Minggu                                                       | 200 Orang  | 200 Orang  | 400,000,000 | 500 Orang | 400,000,000 | 500 Orang | 400,000,000 | 500 Orang | 400,000,000 | 500 Orang | 400,000,000 | 500 Orang | 400,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Tersedianya Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                                  | Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                                 | Jumlah Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                                                              | 1.20.53.04 | Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                                                 | Jumlah Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                                                              | 200 Buku   | 200 Buku   | 250,000,000 | 200 Buku  | 250,000,000 | 200 Buku  | 250,000,000 | 200 Buku  | 250,000,000 | 200 Buku  | 250,000,000 | 200 Buku  | 250,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |

|                                                   |                                             |                                                                                             |            |                                                                                      |                                                                                             |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |      |  |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|--|-----------------------------|
| Pelayanan Prima untuk Jamaah Haji                 | Calon Jamaah Haji di 14 Kab/Kota di Kalteng | Pelayanan Embarkasi Haji Antara                                                             | 1.20.53.08 | Peningkatan Pelayanan Embarkasi Haji Antara                                          | Pelayanan Embarkasi Haji Antara                                                             | 95%       | 95%       | 2,400,000,000 | 100%      | 2,400,000,000 | 100%      | 2,400,000,000 | 100%      | 2,400,000,000 | 100%      | 2,400,000,000 | 100%      | 2,400,000,000 | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Meningkatnya keimanan generasi muda terhadap TYME | Pelajar dan Mahasiswa                       | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental                                             | 1.20.54.01 | Pembinaan mental kepribadian anak                                                    | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental Kepribadian Anak                            | 300 Orang | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Meningkatnya pemahaman pemuda/remaja antar agama  | Pemuda dan Remaja                           | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pemuda/Remaja antar Agama                          | 1.20.54.02 | Pembinaan pemuda/remaja antar agama                                                  | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pemuda/Remaja antar Agama                          | 200 Orang | 200 Orang | 300,000,000   | 300 Orang | 300,000,000   | 300 Orang | 300,000,000   | 300 Orang | 300,000,000   | 300 Orang | 300,000,000   | 300 Orang | 300,000,000   | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Meningkatnya pemahaman KKR anak sekolah minggu    | anak-anak Sekolah Minggu                    | Jumlah yang mengikuti kegiatan KKR anak sekolah minggu                                      | 1.20.54.04 | KKR anak sekolah minggu                                                              | Jumlah yang mengikuti kegiatan KKR anak sekolah minggu                                      | 100 Orang | 100 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 300 Orang | 100,000,000   | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |
| Meningkatnya pemahaman terhadap agama             | Gereja-Gereja                               | Jumlah Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) | 1.20.54.05 | Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) | Jumlah Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) | 355 Buku  | 355 Buku  | 75,000,000    | 200 Orang | 75,000,000    | 200 Orang | 75,000,000    | 200 Orang | 75,000,000    | 200 Orang | 75,000,000    | 200 Orang | 75,000,000    | 100% |  | Biro Adm Kesra dan Kemasya. |

Tabel 2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro                                   | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Biro |            |            |            |            |            | Realisasi Capaian |      |      |      |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun |      |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                  |            |            |                          | 2016                | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2)                                                                              | (3)        | (4)        | (4)                      | (5)                 | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)              | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                     | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1   | Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas                                             | 95%        | 1500 Surat | 1500 Surat               | 1500 Surat          | 1500 Surat | 2000 Surat | 2000 Surat | 3000 Surat | 3000 Surat | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 2   | Jumlah jasa administrasi keuangan                                                | 99%        | 7 Macam    | 7 Macam                  | 7 Macam             | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    | 7 Macam    | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 3   | Jumlah peralatan yang diperbaiki                                                 | 100%       | 10 Unit    | 10 Unit                  | 10 Unit             | 20 Unit    | 20 Unit    | 20 Unit    | 30 Unit    | 30 Unit    | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 4   | Jumlah alat tulis kantor                                                         | 95%        | 16 Macam   | 16 Macam                 | 16 Macam            | 16 Macam   | 20 Macam   | 20 Macam   | 30 Macam   | 40 Macam   | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 5   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                            | 100%       | 500 Buah   | 500 Buah                 | 500 Buah            | 500 Buah   | 500 Buah   | 800 Buah   | 800 Buah   | 800 Buah   | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 6   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                         | 100%       | 10 Unit    | 10 Unit                  | 10 Unit             | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    | 10 Unit    | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 7   | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 99%        | 15 OT      | 15 OT                    | 15 OT               | 15 OT      | 15 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 8   | Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                                 | 99%        | 15 OT      | 15 OT                    | 15 OT               | 15 OT      | 15 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 9   | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi internet                                       | 99%        | 12 Bulan   | 12 Bulan                 | 12 Bulan            | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 10  | Jumlah Monitoring dan evaluasi program                                           | 98%        | 20 OT      | 20 OT                    | 20 OT               | 20 OT      | 20 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 11  | Jumlah orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait                                   | 97%        | 25 OT      | 25 OT                    | 25 OT               | 25 OT      | 25 OT      | 30 OT      | 30 OT      | 30 OT      | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 12  | Jumlah laporan keuangan                                                          | 100%       | 20 Dok     | 20 Dok                   | 20 Dok              | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     | 20 Dok     | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 13  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun                                              | 98%        | 15 Dok     | 15 Dok                   | 15 Dok              | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     | 15 Dok     | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 14  | Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)                                   | 100%       | 65 Buku    | 65 Buku                  | 65 Buku             | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    | 65 Buku    | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 15  | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                 | 100%       | 12 Buku    | 12 Buku                  | 12 Buku             | 12 Buku    | 12 Buku    | 15 Buku    | 15 Buku    | 15 Buku    | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |
| 16  | Jumlah Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakat tentang keluarga sejahtera | 98%        | 15 OT      | 15 OT                    | 15 OT               | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95                       | 96   | 97   | 98   | 99   | 100  |

|    |                                                                                                                                 |      |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|-----|
| 17 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi program keluarga harapan                                                                       | 98%  | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 18 | Jumlah koordinasi dan konsultasi program pengembangan KB                                                                        | 99%  | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 19 | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Generasi Pemuda                                                                                  | 98%  | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 20 | Jumlah Koordinasi Organisasi Kepemudaan                                                                                         | 100% | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 21 | Jumlah yang mengikuti Pembinaan Drum Band Isen Mulang                                                                           | 100% | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 60 Orang   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 22 | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi masalah kemiskinan dan anak terlantar                                                        | 100% | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 23 | Jumlah koordinasi kualitas kesejahteraan perempuan                                                                              | 100% | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 24 | Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan tindak pidana.                                                               | 100% | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 15 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 25 | Jumlah yang mengikuti kegiatanPeran dan fungsi perempuan dilembaga pemerintah                                                   | 100% | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 250 Orang  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 26 | Jumlah Koordinasi Pembinaan Lembaga Adat dan Lembaga Sosial Budaya                                                              | 100% | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 27 | Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pembinaan Peran Masyarakat                                                        | 100% | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 25 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 28 | Jumlah koordinasi pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi                                                                       | 100% | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 14 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 29 | Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah | 100% | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 40 Orang   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 30 | Jumlah yang mengikuti rapat koordinasi lembaga adat dan lembaga sosial budaya                                                   | 100% | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100 Damang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 32 | Jumlah pendampingan tim pembina UKS dan Set. TP. UKS                                                                            | 100% | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 20 OT      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

|    |                                                                                              |      |           |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |    |    |    |    |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|-----|
| 33 | Jumlah Koordinasi pemantauan dan Evaluasi program kemitraan pendidikan formal dan non formal | 100% | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 20 OT     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 34 | Jumlah koordinasi bidang kesehatan di Kab/Kota                                               | 100% | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 35 OT     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 35 | Jumlah yang mengikuti Rapat Koordinasi Antar Umat Beragama                                   | 100% | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 36 | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Minggu              | 100% | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 37 | Jumlah Pengadaan Koleksi Buku dan Perlengkapan Pesantren                                     | 100% | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 200 Buku  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 38 | Persentase Pelayanan Embarkasi haji Antara                                                   | 100% | 95%       | 95%       | 95%       | 95%       | 98%       | 98%       | 100%      | 100%      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 39 | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental Kepribadian Anak                             | 100% | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 40 | Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pemuda/Remaja antar Agama                           | 100% | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 200 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 41 | Jumlah yang mengikuti kegiatan KKR anak sekolah minggu                                       | 100% | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 41 | Jumlah Pengadaan Kidung Jemaat (KJ) Nyayian Kidung Baru (NKB) Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ)  | 100% | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 355 Buku  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIRO ADM. KESRA DAN KEMASYARAKATAN**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

[illegible]